

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AKSESIBILITAS
INFORMASI DESA, KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM KEUANGAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI LNFORMASI, GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA
DESA TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA**

David Sulistiyantoro

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta, Indonesia
david.unjaya@gmail.com

Inna Zahara

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta, Indonesia
innazahara0@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, kompetensi aparatur desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa menjadi faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan pada Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari kuesioner yang diberikan kepada 54 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumberagung.

Kata Kunci : *Sistem, Teknologi Informasi, Kecurangan, Dana Desa*

Abstract

This study aims to determine the factors that influence fraud prevention in village fund management. Internal control system, accessibility of village information, competence of village apparatus, financial system, utilization of information technology, and leadership style of village head are the factors studied in this study. The research was conducted in Sumberagung Village, Jetis District, Bantul Regency. This study used primary data sources derived from questionnaires given to 54 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results showed that the internal control system, accessibility of village information, financial system, utilization of information technology, and leadership style of the village head did not affect the prevention of fraud in village fund management. The competence of village officials is the only influential factor in preventing fraud in managing village funds in Sumberagung Village.

Keywords: *System, Information Technology, Cheating, Village Fund*

1. PENDAHULUAN

Desa dapat dikatakan sebagai representasi dari kesatuan hukum terkecil di Indonesia. Terdapat sistem desentralisasi antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah sampai ke tiap desa atau kalurahan. Dana desa dapat dikatakan meningkat dari awal resmi pertama kali diberikan. Pengelolaan keuangan dana desa menjadi perhatian

mengingat setiap pimpinan atau kepala desa berganti sesuai waktu yang telah ditentukan dan hanya dapat dipilih satu kali atau setiap warga memiliki kesempatan menjabat kepala desa sebanyak dua kali. Perbedaan karakter, kemampuan pimpinan sampai Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa dapat berubah-ubah. Masih terpatrynya mindset lama tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya fungsi kepala desa sebagai sebagai “raja kecil”. Masih lemahnya kapasitas SDM yang dimiliki oleh perangkat Desa yang bisa mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengelolaan dikhawatirkan jatuh pada beberapa kesalahan atau pelanggaran fungsi atas uang yang dikelola.

Alokasi dana desa yang menjadi akuntabilitas keuangan publik rentan terjadi penyelewengan ataupun tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan. Berbagai cara dilakukan oleh oknum ataupun pelaku korupsi di pemerintahan desa. Dugaan tidak transparan, mark up, program fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa menjadi laporan yang disampaikan oleh masyarakat (Isti, 2019). Risiko kecurangan (*fraud*) yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa karena penggunaan kas desa secara tidak sah. Mark up dan atau Kick Back pada pengadaan barang atau jasa. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi aparat desa secara tidak sah aset desa, berupa sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor ataupun kendaraan kantor, dan pungutan liar pelayanan desa. Beberapa kasus korupsi yang terjadi akibat kecurangan ini diantaranya melibatkan kepala desa di Kulon Progo

(Purba & Zebua, 2019), mantan kepala desa Janji Manahan Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa, terdakwa kasus korupsi desa di Kudus dengan total kerugian Rp. 1.8 miliar, mantan kepala desa Lau Kecamatan Dawe melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2018-2019, dua perangkat desa di Probolinggo terlibat korupsi 689 pada alokasi dana desa tahun 2017-2020, tiga perangkat desa Waduruka Nusa Tenggara Barat ditetapkan tersangka oleh Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota (Nickyrawi, 2022). Ironis rasanya ketika seharusnya dana desa bermanfaat untuk masyarakat justru disalahgunakan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi salah satu bentuk pengendalian untuk mengawal alokasi dana desa. Komponen SPI dari lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, pemantauan, penilaian resiko, serta informasi dan komunikasi menjadi hal yang seharusnya dapat mengatasi segala bentuk kecurangan jika diimplementasikan sebagaimana mestinya aturan yang berlaku. Sistem keuangan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan secara real penggunaan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh perwakilan DPD desa ataupun masyarakat. Jika terjadi mark-up ataupun penyelewengan secara sistem akan terbaca sehingga dapat segera ditanggulangi. Pemanfaatan teknologi informasi juga harus digalakan mengingat saat ini sudah era 4.0 yang menuju 5.0. Nantinya masyarakat dengan mudah akan mengetahui, menelusuri, bertanya terkait penggunaan dana desa. Gaya kepemimpinan kepala desa juga menjadi

ranah penting mengingat ujung tombak desa berada ditangan kepala desa. Penyelewengan ataupun kecurangan dapat teratasi jika kepala desa memiliki sikap tegas atas segala bentuk kecurangan. Hal di atas menjadi harapan upaya desa, upaya masyarakat, upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran.

Tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis dan formulasi rekomendasi yang diperlukan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa agar tepat sasaran sesuai tujuan yang dicanangkan pemerintah pusat. Urgensi penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang bebas dari praktek korupsi, kecurangan ataupun penyelewengan sehingga tujuan pemerintah pusat tercapai dari alokasi dana desa yang telah dianggarkan dan diberikan tiap tahunnya untuk Indonesia lebih maju.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Stewardship theory disajikan sebagai alternatif (beberapa orang mungkin mengatakan "komplementer") untuk teori agensi. Tidak seperti teori agensi yang berfokus pada kontrol dan konflik, teori *stewardship* menekankan kerjasama dan kolaborasi (Sundaramuthy dan Lewis, 2003), dan menyediakan premis non-ekonomi untuk menjelaskan hubungan. *Stewardship theory* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu

tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Rezkiyanti, 2019).

Tatalaksana Pemerintahan

Tatalaksana pemerintahan di Indonesia terbagi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan sampai di tingkat desa atau jika di Yogyakarta adalah kalurahan. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan salah satu tujuan pengaturan desa yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif. Maksud dari undang-undang ini adalah negara ingin memperkecil perbedaan ataupun ketimpangan sosial dengan membuat beberapa aturan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat sasaran dengan program-program dari bawah. Perbaikan kesejahteraan masyarakat diharapkan tercipta dengan adanya kebijakan desa atau kalurahan akan mendapatkan dana transfer yang disebut dengan dana desa yang berasal langsung dari pemerintah pusat dan telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akuntabilitas

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan

penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Aini dan Purboyo, 2020).

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Meinawati (2013) pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu cara atau proses mengatur keuangan dana desa yang diberikan pemerintah dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi salah satu bentuk pengendalian untuk mengawal alokasi dana desa. Komponen SPI dari lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, pemantauan, penilaian resiko, serta informasi dan komunikasi menjadi hal yang seharusnya dapat mengatasi segala bentuk kecurangan jika diimplementasikan sebagaimana mestinya aturan yang berlaku.

Aksesibilitas Informasi Desa

Aksesibilitas merupakan perpindahan informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi

secara mudah, aman, nyaman, dan kecepatan yang semestinya (Novalia & Nahar, 2022). Penerapan akuntansi keuangan yang maksimal, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses informasi terkait pengelolaan dana desa dan informasi lainnya yang akan dijadikan untuk pengambilan keputusan serta untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan. Kemudahan akses yang diperoleh masyarakat akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah & Handayani (2017), Fikrian (2017), menunjukkan adanya pengaruh positif antara aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi Aparatur Desa

Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan, 2019).

Sistem Keuangan

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan desa. Aplikasi ini untuk kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui aplikasi ini (Rivan & Maksun, 2019).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah telah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Teknologi Informasi yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan sebuah akses dengan biaya yang terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan manusia (Razi, 2017).

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melakukan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha untuk membimbingnya atau mereka yang mungkin mengamati dari luar (Ubaidillah & Cahayuni, 2022). Megawaty, Hamdat, & Aida (2022) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola perilaku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil dari kombinasi filosofi, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek penelitian adalah desa atau kalurahan Sumberagung, Jetis, Bantul. Jenis data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu objek penelitian atau responden berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner penelitian yang dikumpulkan dengan metode survei. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, kompetensi aparatur desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, gaya kepemimpinan kepala desa, Variabel dependennya adalah Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Y). Penilaian dilakukan dengan beberapa pertanyaan menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1-4.

Pengujian data kuesioner menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan uji F (simultan) dan koefisien determinasi, serta uji t (parsial).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat 54 kuesioner yang dibagikan kepada 54 responden yang berasal dari Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Responden penelitian ini adalah 22 Pengurus Desa yang terdiri dari Lurah Desa, Carik, Kasi, Kaur, dan Staf, 23 Pengurus LPMD Desa Sumberagung, dan 9 responden yang merupakan pimpinan dan ketua bidang Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung.

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa nilai r-hitung dari seluruh pernyataan lebih tinggi dari nilai r-tabel, sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Terdapat 59 butir pernyataan untuk variabel pencegahan kecurangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, kompetensi aparatur desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel penelitian reliabel dan dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Pada uji normalitas nilai signifikan sebesar 0,200 atau $>0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Pada uji multikolinearitas yang pertama terdapat dua variabel, yaitu X1 dan X2 yang memiliki nilai *tolerance* $<0,10$ dan nilai VIF >10 . Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat multikolinearitas. Apabila terdapat multikolinearitas, variabel tersebut perlu dihapus dari model. Tujuan penghapusan variabel adalah mengurangi kelebihan informasi yang sudah diwakili oleh predictor lainnya. Dengan menghilangkan variabel dari model tidak akan mengurangi R kuadrat secara drastis. Setelah X1 dan X2 dikeluarkan dari model hasil uji menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai sig. dari enam variabel independen $>0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T	Sig.
(Constant)	1.795	0.922	0.361
Sistem Pengendalian Internal	0.138	0.904	0.370
Aksesibilitas Informasi Desa	-	-	0.859
Kompetensi Aparatur Desa	1.202	7.349	0.000
Sistem Keuangan Pemanfaatan	-	-	0.997
Teknologi Informasi	0.001	0.004	0.984
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa	0.004	0.021	0.984
	0.135	0.792	0.433

Berdasarkan data di atas, persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$
$$Y = 1,795 + 0,138X_1 - 0,057X_2 + 1,202X_3 - 0,001X_4 + 0,004X_5 + 0,135X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1= Sistem Pengendalian Internal

X_2= Aksesibilitas Informasi Desa

X_3= Kompetensi Aparatur Desa

X_4= Sistem Keuangan

X_5= Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_6= Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

e = Variabel independen lain yang tidak diukur

Berikut merupakan penjelasan terkait persamaan regresi linier berganda:

- Nilai konstanta sebesar 1,795 menunjukkan apabila sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, kompetensi aparatur desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa bernilai 0 (nol), maka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar nilai konstanta tersebut atau 1,795.
- Nilai koefisien regresi sistem pengendalian internal sebesar 0,138 positif. Nilai tersebut menunjukkan setiap adanya peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1 satuan, maka nilai pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,138

satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- Nilai koefisien regresi aksesibilitas informasi desa sebesar 0,057 negatif. Nilai tersebut menunjukkan setiap adanya penurunan aksesibilitas informasi desa sebesar 1 satuan, maka nilai pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa menurun sebesar 0,057 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi kompetensi aparatur desa sebesar 1,202 positif. Nilai tersebut menunjukkan setiap adanya peningkatan kompetensi aparatur desa sebesar 1 satuan, maka nilai pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa mengalami peningkatan sebesar 1,202 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi sistem keuangan bernilai 0,001 negatif. Nilai tersebut menunjukkan setiap adanya penurunan sistem keuangan sebesar 1 satuan, maka nilai pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa mengalami penurunan sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,004 positif. Nilai tersebut menunjukkan setiap adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 satuan, maka nilai pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,004 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan kepala desa sebesar

0,135 positif. Nilai tersebut menunjukkan setiap adanya peningkatan gaya kepemimpinan kepala desa sebesar 1 satuan, maka nilai pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,135 dengan asumsi variabel lain konstan.

Pengujian Hipotesis

Uji F dan Koefisien Determinasi

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk menilai pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila hasil uji menunjukkan signifikansi $F < 0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen, yang menjelaskan semua variabel independen sekaligus dan secara signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini, nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat diartikan seluruh variabel independen pada penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besaran nilai *Adjusted R square*. Nilai *Adjusted R square* pada penelitian ini adalah 0,895. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 89,5% pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel independen penelitian ini, 10,5% pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh serta signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial ketika menjelaskan variabel dependen. Jika nilai signifikansi t (*p-value*) $< 0,05$ maka hipotesis terdukung dan menjelaskan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Berdasarkan data pada Tabel 1.8 dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai signifikansi sistem pengendalian internal yaitu 0,370. Nilai tersebut $> 0,05$ maka sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Terlepas dari seberapa baik sistem pengendalian internal, kecurangan tetap dapat terjadi ketika terdapat oknum yang menjalankan sistem menyalahgunakan kekuasaan mereka. Keadaan ini kemudian dapat menyebabkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (Rahmawati & Soetikno, 2012).
- b. Nilai signifikansi aksesibilitas informasi desa yaitu 0,859. Nilai tersebut $> 0,05$ maka aksesibilitas informasi desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Aksesibilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas, publik atau masyarakat akan bersedia melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa sehingga kecurangan bias dicegah. Meskipun aksesibilitas informasi

dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi aktivitas desa dalam pengelolaan dana desa, ketersediaan informasi juga perlu diperhatikan sehingga kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

- c. Nilai signifikansi kompetensi aparatur desa yaitu 0,000. Nilai tersebut $<0,05$ maka kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil uji hipotesis ini dapat diartikan dengan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan lebih baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mufidah & Masnun (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
- d. Nilai signifikansi sistem keuangan yaitu 0,997. Nilai tersebut $>0,05$ maka sistem keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini berbeda dengan penelitian Fathia & Indriani (2022) yang menyebutkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Adanya sistem terintegrasi dan terkomputerisasi akan menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel dalam pengelolaan

dana desa sehingga kecurangan dapat dicegah.

- e. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi yaitu 0,984. Nilai tersebut $>0,05$ maka pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini dapat disebabkan kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan pencegahan kecurangan. Teknologi yang ada hanya dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi desa.
- f. Nilai signifikansi gaya kepemimpinan kepala desa yaitu 0,433. Nilai tersebut $>0,05$ maka gaya kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Gaya kepemimpinan kepala desa gagal mendorong pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Seorang pemimpin diharapkan mampu mengatur, merencanakan dan membimbing bawahannya serta masyarakat agar tidak terjadi kecurangan. Gaya kepemimpinan bukanlah bakat, sehingga perlu dipahami dan diterapkan sesuai aturan dan situasi.

5. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. H1 dalam penelitian ini tidak terdukung, artinya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan

- kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
- b. H2 dalam penelitian ini tidak terdukung, artinya aksesibilitas informasi desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
 - c. H3 dalam penelitian ini terdukung, artinya kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
 - d. H4 dalam penelitian ini tidak terdukung, artinya sistem keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
 - e. H5 dalam penelitian ini tidak terdukung, artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
 - f. H6 dalam penelitian ini tidak terdukung, artinya gaya kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

6. REFERENSI

- Aini, F. N., & Purboyo, T. (2022). Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 18(2), 1–12. <https://doi.org/10.56681/da.v18i2.43>
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 14.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Mira Wacana Media.
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Implementasi Good Governance serta Implikasinya pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8, 1–15.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Contrafatto, M. (2014). Stewardship theory: Approaches and perspectives. *Advances in Public Interest Accounting*, 17, 177–196. <https://doi.org/10.1108/S1041-706020140000017007>
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai

- pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 455–468.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *6*, 16.
- Fikriani, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekom*, 4.
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud & Auditing*. Mira Wacana Media.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2015). *Auditing (Jilid 1)*. UPP AA YKPN.
- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun Dan Desa Segarajaya). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 2. <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2341>
- Harafonna, C. N., & Indriani, M. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 359–373. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12277>
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Kencana.
- Ibrahim, M. R., Cangara, H., & Yunus Amar, M. (2020). AKSESIBILITAS INFORMASI GLOBAL DI KALANGAN MASYARAKAT PADA 2 DESA DI KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU (STUDI TENTANG PENGGUNAAN MEDIA ONLINE DI DAERAH PEDESAAN) *Global Information Accessibility in 2 Villages in Belopa District, Luwu District (A Study About*. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 282–291.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Isti, I. (2019). Banyak Masalah Terkait Dana Desa. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/1/r/artikel--ombudsman--banyak-masalah-terkait-dana-desa>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan*

- Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Karyono. (2013). Forensic Fraud.
- Kurniawan Saputra, K. A. (2019). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.992>
- Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2155. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>
- Lubis, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akruar, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Megawati, M., Hamdat, A., & Aida, N. (2022). Examining Linkage Leadership Style, Employee Commitment, Work Motivation, Work Climate on Satisfaction and Performance. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 2(1), 01–14. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v2i1.86>
- Meinawati. (2013). Pengelolaan Gugus Depan Pramuka Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. *Journal of the American Chemical Society*, 123(10), 2176–2181. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Nasir, A., & Oktari, R. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02), 02. <https://doi.org/10.31258/je.19.02.p%p>
- Nickyrawi, F. (2022). 3 Perangkat Desa di Bima NTB Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d->

- 5919419/3-perangkat-desadi-bimantb-jaditersangka-dugaankorupsi-danadesa
- Novalia, I. A., & Nahar, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Pengawasan Fungsional, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa The Influence of Presentation of Financial Statements, *Acc. Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6, 194–209.
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran” di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016. *Directory Journal of Economic*, 1(2). <https://dx.doi.org/10.31002/dinamic.v1i2.511>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Yang Mengatur Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Yang Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Otonomi Luas.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Otonomi Luas.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Otonomi Luas.
- Purba, D. O., & Zebua, D. J. (2019). Gelapkan Dana Desa Rp 1,15 M, Kades dan Bendara Desa di Kulon Progo Ditahan. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/04/22572271/gelapkan-dana-desa-rp-115-m-kades-dan-bendara-desa-di-kulon-progo-ditahan?page=all>.
- Putra, C. K., & Pratiwi, R. N. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). 10.
- Putri, A. P., & Yadiati, W. (2020). The Impact of Participative Leadership and Competencies on Performance of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 42. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.27757>
- Rahmawati, A. P., & Soetikno, I. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal

- Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang [Other, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. <http://eprints.undip.ac.id/35622/>
- Rasmini, N. K., & Mimba, P. S. H. (2021). The influence of apparatus competence, leadership style, tri hita karena culture and society participation on the effectiveness of village fund management. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2046>
- Ratu, N. I. H., Sari, M. M. R., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2018). Kecerdasan Spiritual Memoderasi Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 57. <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i01.p03>
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Rezkiyanti, Y. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17–24. e-jurnal.nobel.ac.id
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (3 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Rivan, A., Ridwan Maksum, I., Kunci, K., Keuangan Desa, S., Desa, P., & Keuangan, M. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 2019. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. 3, 12.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, XIX, 1–18.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 2.
- Saputra, K., Sujana, E., & Tama, M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karena dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1, 28–41. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Seda, L., & Tilt, C. A. (2020). Disclosure of fraud control information in annual reports as a means of discharging public accountability. *Journal of Financial Crime*, ahead-of-print(ahead-of-print).

- <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0154>
- Shafira, A. Y., & Utami, E. R. (2021). Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Teknologi Informasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1025–1040. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p18>
- Soukotta, V., & Utami, I. (2019). Apakah Gaya Kepemimpinan Mendukung Potensi Pengungkapan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa? *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 223–238.
- Sutabri, T. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Andi.
- Tikollah, M. R., & A. Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 87. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5064>
- Ubaidillah, M., & Cahayuni, M. (2022). The Role of Leadership Style in Organizational Culture and Competence to Improve Village Fund Management Accountability. *Journal of Business and Management Review*, 3(1), 082–093. <https://doi.org/10.47153/jbmr31.3012022>
- Wan Zahari Wan Yusoff and Maziah Ismail. (2008). Stewardship theory: is board accountability necessary? *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.32400/iaj.26684>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*, 1–16.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Widiyarta, K., Nyoman Trisna Herawati, S. E. A., & Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S. E. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 2. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13930>.